

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KOTO RAJO KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG DALAM PENANGANAN COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

RETNO SARI
NPM : 147310536

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

.UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Retno Sari
NPM : 147310536
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kuantan
Hilir Seberang Dalam Penangan Covid-19

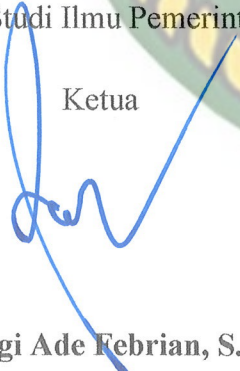
Format sistematika dan pembahasan materi masing- masing dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif dan kriteria metode peneitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta disetujui dan diuji dalam sidang ujian Konferehensif.

Pekanbaru, 25 Desember 2021

Turut Menyetujui,
Prodi Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si


Dr. Khairul Rahman, S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Retno Sari
NPM : 147310536
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Gaya kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan
Kuantan Hilir Seberang dalam Penanganan Covid-19

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 25 Desember 2021

Ketua



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Anggota,



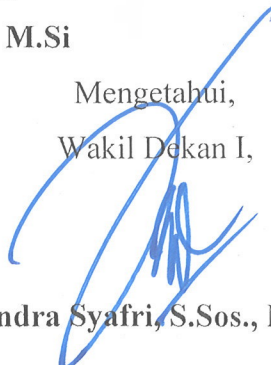
Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 008/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Retno Sari
N P M : 147310536
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam Penanganan Covid 19.**

Struktur Tim :

1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sadriah lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

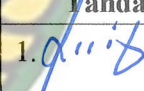
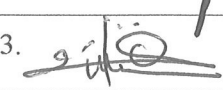
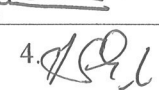
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

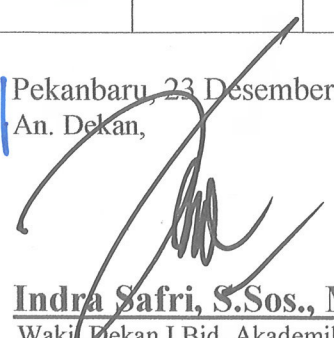
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 008 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 22 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 23 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Retno Sari
NPM : 147310536
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam Penanganan Covid 19.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 23 Desember 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reto Sari
NPM : 147310536
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam Penanganan Covid-19

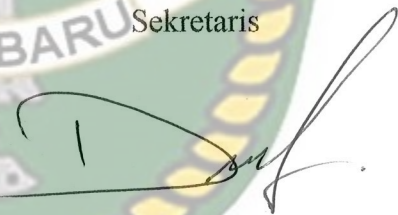
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh Karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 25 Desember 2021

Ketua

Sekretaris


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

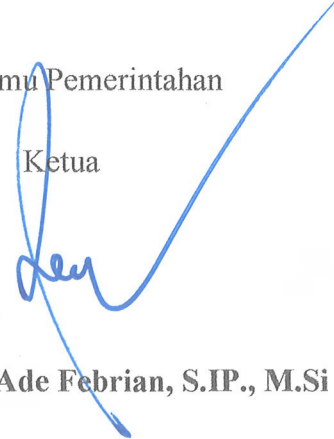
Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Prodi Ilmu Pemerintahan

Ketua


Indra Syafri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan.

Usulan penelitian yang berjudul **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19”** ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi.,SH.,MH yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.si selaku Dekan Fisipol Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi untuk berjuang menggapai gelar dilembaga yang bapak pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M. Si. Selaku Ketua Program studi dan jajaran dosen pada jurusan ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman,S.Sos.,M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultasn Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk Bapak Oslan Dewata dan Ibu Yulian yang selalu memberi dukungan dalam setiap usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Untuk semua keluarga terkhusus kepada adik tersayang Haffiezzah yang telah setia menemani selama penelitian, teman- teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah berkontribusi dalam mengasih suport dan semnangat.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Penulis,

Retno Sari



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	 8
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Konsep Ilmu Pemerintah.....	8
2. Konsep Pemerintahan.....	9
3. Pemerintahan Daerah.....	10
4. Konsep Fungsi-Fungsi Pemerintahan.....	16
5. Konsep Desa.....	17
6. Konsep Pemerintah Desa	18
7. Konsep Gaya Kepemimpinan.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Konsep Operasional	29
E. Operasional Variabel.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	32

D. Teknik Penarikan Sampel.....	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisa Data.....	34
H. Jadwal Waktu Kegiatan.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuansing.....	36
B. Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing.....	37
C. Gambaran Umum Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing.....	38
D. Kondisi Pemerintahan Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing.....	39
E. Demografi Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing.....	42
F. Keadaan Sosial Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing.....	44
G. Keadaan Ekonomi Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Identitas Responden.....	51
B. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.....	52
1. Gaya Otokratik.....	54
2. Gaya Demokratik/Partisipatif.....	56
3. Gaya Bebas (Free Rein).....	59
BAB VI PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Penelitian Terdahulu.....	26
II.2 Operasional Variabel.....	30
III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.....	35
IV.1 Kawasan Luas Wilayah Desa Koto Rajo.....	43
IV.2 Jumlah Penduduk Desa Koto Rajo.....	44
IV.3 Jumlah Penduduk Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
IV.4 Daftar Lembaga Pendidikan Di Desa Koto Rajo.....	46
IV.5 Jumlah penduduk Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing Berdasarkan Kepercayaan.....	47
IV.6 Daftar Jumlah Tempat Ibadah Desa Koto Rajo.....	47
IV.7 Sektor Pertanian Desa Koto Rajo.....	48
IV.8 Sektor Peternakan Desa Koto Rajo.....	49
IV.9 Sektor Ketenagakerjaan dan Mata Pencarian Desa Koto Rajo	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.....	28
VI.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Koto Rajo.....	41



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama : Retno Sari
NPM : 147310536
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat adanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 2 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya iktui serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Pelaku Pernyataan


Retno Sari

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KOTO RAJO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG DALAM PENANGANAN COVID-19

ABSTRAK

Oleh : Retno Sari

Penelitian ini menganalisis sejauh mana penanganan kasus covid-19 di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang serta untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa fenomena seperti, Dalam mendistribusikan bansos kepada masyarakat, maka seorang kepala desa memiliki peranan penting agar penyaluran bantuan sosial di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam pembagian bansos kepada masyarakat masih belum semua kebagian terlebih-lebih bagi mereka yang berhak mendapatkannya atau belum sepenuhnya merata di berikan kepada masyarakat Desa Koto Rajo. Dengan demikian gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan pemberian bansos harus benar-benar di perhatikan dalam konsep keadilan seperti pada pasal 1 diatas bahwa bantuan sosial di peruntukkan pada masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang terkena dampak dari Covid-19. Berdasarkan uraian fenomena yang dikemukakan tadi, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19”. Kemudian penelitian ini menggunakan 3 indikator yaitu, Gaya Otokratik, Gaya Demokratik/Partisipatif, dan Gaya Bebas (Free Rein). Karena keterbatasan dalam penelitian ini, baik kemampuan, waktu maupun biaya, maka ada beberapa populasi yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini yaitu mencakup Kepala Desa Koto Rajo, BPD Koto Rajo, Camat Kuantan Hilir, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat Di Desa Koto Rajo dengan total 14 sampel penelitian dengan Metode Penelitian Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif serta dukungan pengumpulan data dari wawancara, menunjukan bahwa Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 masuk dalam kategori Gaya Kepemimpinan Demokratik/Partisipatif. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 selalu melibatkan bawahan serta unsur-unsur lainnya seperti BPD, Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa Koto Rajo

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepala Desa, Penanganan Covid-19

LEADERSHIP STYLE OF THE HEAD OF KOTO RAJO VILLAGE, KUANTAN HILIR SEBERANG DISTRICT IN HANDLING COVID-19

ABSTRACT

From : Retno Sari

This study analyzes the extent of the handling of COVID-19 cases in Koto Rajo Village, Kuantan Hilir Seberang District and to find out the Leadership Style of the Koto Rajo Village Head, Kuantan Hilir Seberang District in Handling Covid-19. This study found several phenomena such as, In distributing social assistance to the community, a village head has an important role so that the distribution of social assistance is given to people in need, especially those affected by Covid-19. However, in the distribution of social assistance to the community, not all of them get, especially for those who are entitled to it or it has not been fully distributed to the people of Koto Rajo Village. Thus the leadership style of the Village Head in implementing the provision of social assistance must really be considered in the concept of justice as in Article 1 above that social assistance is intended for the poor, underprivileged, and/or vulnerable to social risks affected by Covid-19 . Based on the description of the phenomenon stated earlier, the main problem in this study is "How is the Leadership Style of the Koto Rajo Village Head, Kuantan Hilir Seberang District in Handling Covid-19". Then this study uses 3 indicators, namely, Autocratic Style, Democratic/Participatory Style, and Free Style (Free Rein). Due to the limitations in this study, both in terms of ability, time and cost, the authors sampled several populations in this study, which included the village head of Koto Rajo, BPD Koto Rajo, sub-district head of Kuantan Hilir, community leaders, and the community in Koto Rajo village with a total of 14 research samples with Qualitative Research Methods. Based on the results of research using quantitative methods and data collection support from interviews, it shows that the Leadership Style of the Koto Rajo Village Head, Kuantan Hilir Seberang District in Handling Covid-19 is in the category of Democratic/Participatory Leadership Style. This is due to the fact that the Head of Koto Rajo Village, Kuantan Hilir Seberang District, in handling Covid-19 always involves subordinates and other elements such as BPD, Community Leaders and the Koto Rajo Village Community.

Keywords: Leadership Style, Village Head, Handling Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. “Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri, ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga, akibat pandemi ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebabkan disorganisasi disegala bidang kehidupan manusia. Diorganisasi pada masyarakat nantinya akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu. Sehingga dapat berpengaruh pada tatanan sosial di masyarakat. Terlihat pada sikap dan perilaku masyarakat di saat pandemi sekarang mereka cenderung berprasangka atau memiliki rasa takut dan juga diskriminasi. Sehingga seseorang tidak dapat secara leluasa menjalankan perannya di masyarakat karena gangguan dan masalah sosial yang ada selama masa pandemi Covid-19. Hampir seluruh pemerintahan di setiap negara yang terjangkit virus corona (Covid-19) kewalahan dalam mengambil berbagai langkah maupun tindakan untuk mencegah penyebarannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus positif yang pasiennya kian hari meningkat, Indonesia” mencapai 2.473 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 121.226 kasus per 7 Agustus 2020 (health.detik.com). Dalam memutus mata rantai penularan

Covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah seperti menetapkan dan memberlakukan berbagai bentuk kebijakan di setiap daerah, seperti : pembatasan dan penutupan aktivitas ditempat- tempat keramaian (pasar, objek wisata, tempat ibadah, dan seterusnya), penerapan protokol kesehatan, pembatasan akses keluar masuk masyarakat antar wilayah, Work From Home (WFH), School From Home (SFH), dan seterusnya

Dalam lingkungan masyarakat, tentunya masyarakat menginginkan sebuah pemimpin yang bijaksana, efektif dan tanggung jawab. Masyarakat berharap agar pemimpin di daerahnya dapat menampung aspirasi atau ide-idenya dalam mengambil suatu keputusan. Terlebih lagi dalam sebuah masalah skala internasional yang cukup mengkhawatirkan, peran pemimpin sangat diperlukan. Dalam setiap aspek kehidupan tentunya tidak terlepas dari sebuah pengaruh dan yang dipengaruhi. Sehingga tidak asing lagi yang terdengar istilah kepemimpinan. Pemimpin merupakan orang yang melaksanakan suatu organisasi, lembaga dan sebagainya. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang dimiliki seorang pemimpin dalam melaksanakan suatu roda organisasi, lembaga dan yang lainnya. Kepemimpinan pada dasarnya sifat bawaan yang dimiliki pemimpin (Asy'ari et al., 2013).

Menurut Daswati (2012) kepemimpinan memiliki peranan sebagai suatu perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin sesuai dengan kedudukannya sebagai bentuk harapan dari bawahannya. Di dalam organisasi sendiri mengidentifikasi suatu pekerjaan yang dikerjakan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan dengan seiring pekerjaan tersebut, sehingga harapan mengenai

peran penting dalam mengatur perilaku bawahan (Hadiyanti, 2015). Di dalam lingkungan masyarakat agraris ada banyak seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik yang masih bersifat tradisional. Pemimpin dengan tipe kepemimpinan tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor misalnya adanya peranan adat istiadat yang sangat kuat di dalam lingkungan masyarakat, adanya kedekatan hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, adanya ikatan Primordial, dan extended family system. Fakto-faktor tersebutlah yang biasanya seorang pemimpin dengan tipe paternalistik cukup dekat dengan masyarakat maupun bawahannya di dalam sebuah organisasi (Erlangga et al., 2014). Dalam kondisi tersebut bagaimana pemerintah dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana pemimpin mengatur dan memutuskannya. Seperti halnya organisasi Pemerintahan Desa, Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah Organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin.

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa peranan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan, bisa menjadi pelopor, teladan buat bawahannya sangat dibutuhkan dalam semua organisasi baik itu swasta maupun pemerintah. Hal tersebut didukung oleh Bass (1990:25) yang menyatakan bahwa kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dari keberhasilan atau kegagalan organisasi, baik yang berorientasi bisnis maupun publik. Berhasil atau tidaknya organisasi tersebut biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpinnya. Dari pandangan Bass tersebut, terbukti bahwa peranan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya baik itu dalam organisasi swasta maupun pemerintah sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi.

Desa Koto Rajo salah satu organisasi Pemerintahan Desa yang perlu dilihat bagaimana peran kepemimpinannya. Koto Rajo sendiri adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Bila dikaitkan dengan situasi belakangan ini yaitu Covid-19, gaya kepemimpinan seperti apa yang dilakukan oleh kepala desa Koto Rajo dalam mengatasi pandemic Covid-19 di Desa Koto Rajo. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pemberitaan media online riaonline.co.id 2 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi terbanyak penyebaran kasus covid-19. Data per Selasa, 11 Mei 2021, dari 77 penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 kecamatan Kuantan Mudik menyumbang 29 kasus baru dan Kecamatan Singingi Hilir 28 kasus baru.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kabupaten Kuansing per Selasa, 11 Mei 2021 dalam sehari terdapat 77 penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19, dua pasien covid-19 meninggal dunia dan 25 dinyatakan sembuh. Bahkan dari 28 kasus baru Kecamatan Singingi Hilir terdapat 5 orang berasal dari Desa Koto Rajo. Artinya Desa Koto Rajo menyumbang banyak kasus positif di wilayah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Berkaca pada kasus tersebut, di sini penulis tertarik untuk melihat seperti apa kebijakan ataupun gaya kepemimpinan kepala desa Koto Rajo di dalam menghadapi situasi warganya yang terkena Covid-19. Pengamatan penulis dilapangan, Kepala Desa Koto Rajo mengambil beberapa kebijakan terkait warganya yang terpapar Covid-19 dengan memberikan sosialisasi melalui RT/RW dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Resiko sosial yang di akibatkan oleh wabah Covid-19 membuat masyarakat rentan terhadap pemenuhan kebutuhan sandang diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19 akibat lumpuhnya ekonomi masyarakat seperti PHK,UMKM yang sepi, dan segi-segi ekonomi masyarakat lainnya.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial”. Resiko sosial yang di akibatkan oleh wabah Covid-19 membuat masyarakat rentan terhadap pemenuhan kebutuhan sandang diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan kehidupan

masyarakat yang terdampak Covid-19 akibat lumpuhnya ekonomi masyarakat seperti PHK, UMKM yang sepi, dan segi-segi ekonomi masyarakat lainnya.

Pendistribusian bansos di Desa Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuansing telah diberikan kepada masyarakat miskin, kurang mampu dan terkena dampak Covid-19 sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Presiden tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial. Dalam mendistribusikan bansos kepada masyarakat, maka seorang kepala desa memiliki peranan penting agar penyaluran bantuan sosial di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam pembagian bansos kepada masyarakat masih belum semua bagian terlebih-lebih bagi mereka yang berhak mendapatkannya atau belum sepenuhnya merata di berikan kepada masyarakat Desa Koto Rajo. Dengan demikian gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan pemberian bansos harus benar-benar di perhatikan dalam konsep keadilan seperti pada pasal 1 diatas bahwa bantuan sosial di peruntukkan pada masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang terkena dampak dari Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimanakah Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19**”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Secara Praktis

Bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dapat dijadikan masukan bagi Kepala Desa Koto Rajo akan pentingnya Gaya kepemimpinan dalam penanganan Covid-19.

c. Secara Akademis

Sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai penanganan Covid-19.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam landasan karya tulis ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penulisan.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam perkembangannya saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan definisi-definisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri. Menurut D. G. A. Van Polje (1953; 1) Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut U. Rosenthal dalam Syafiie (2009; 21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut H. A. Brasz (dalam Syafiie, 2009 ; 21) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Bagi Syafiie (2009 ; 23) sendiri Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengauran (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan secara arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan Pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang- undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Syafiie 2009 ; 20).

Menurut Budiardjo (2008 ; 21) memberikan pengertian Pemerintah dapat juga berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep- konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijakan (policy, beleid) dan pengambilan (distribusion), atau alokasi (allocation).

Selanjutnya Ndraha (2003 ; 6) mendefenisikan Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan,

sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Ndraha juga menyebutkan istilah *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan, maka dapat dikaitkan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama ;

- a. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintah adalah pemerintah dalam artian luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan negara. (2003: 69)

3. Pemerintahan Daerah

Riawan (2009: 197) mengatakan Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah. Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Pelaksanaan desentralisasi

dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus.

Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk

republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.”Pemberian otonomi yang seluas- luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas- seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada

bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan

Bagir Manan (2000 : 70) Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*publick rechtspersoon publick legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah. "Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi beserta perangkat daerah lainnya, Sehingga tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada

masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

4. Konsep Fungsi- Fungsi Pemerintahan

Menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*).
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam- ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (*stabilisator perekonomian*) (Guritno, 2000:2). Van Poelje (dalam Hamdi, 1999 : 52) mengatakan bahwa dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat.

Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya.

Ndraha (2000 : 78- 79) membedakan fungsi pemerintah yaitu “fungsi primer dan fungsi sekunder”, yang penjelasan lebih lanjut dari kedua fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Fungsi sekunder pemerintah berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

5. Konsep Desa

Bintaro (dalam Nircholis, 2011: 14) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas- batasnya.

Menurut Nawawi (2003: 24) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempa asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang berujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan menurut Nurcholis (2011: 4) Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau ikatan lahir batin antara masing- masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrasi berada dibawah Pemerinthan Kabupaten atau Kota.

Sehubungan dengan arti dan pengertian tentang Desa, maka menurut Boeke (dalam Wasistiono dan Tahir, 2006: 5) mengatakan bahwa Desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri, daerah sendiri, dan kekayaan pendapatan sendiri”.

6. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Widjaja (2003: 3) Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

7. Konsep Kepemimpinan

Berbagai definisi kepemimpinan telah dinyatakan oleh para penulis. Setiap definisi yang dinyatakan oleh para penulis berpijak pada latar belakang dan bidang ilmu yang digeluti. (Kelly-Rawat, S dan Waldock, 2004) menyatakan bahwa pengaruh adalah jantung kepemimpinan. “Kepemimpinan adalah suatu

proses untuk mempengaruhi sebuah kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan- tujuan mereka.” Demikian Sunarta (2013) memperkuat definisi kepemimpinan yang menggaris bawahi bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Berdasarkan definisi kepemimpinan yang di atas bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan harus meliputi beberapa hal penting yaitu:

- 1) Seni dan ilmu yang dinamis dan bersifat situasional, serta bisa dipelajari;
- 2) Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) memengaruhi orang lain;
- 3) keinginan memengaruhi orang lain;
- 4) kemampuan menggerakkan orang lain berdasarkan cara-cara yang disukai;
- 5) membantu orang untuk menemukan nilai dan potensi mereka dengan memberikan inspirasi sehingga mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dan menemukannya dalam diri mereka (Kadir, 2018).

Salah satu teori yang mendasarkan diri dengan gaya kepemimpinan adalah teori model kontingensi dari Fiedler. Menurut Fiedler (Gregory Stone et al., 2004) gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi anak buah, lebih mementingkan tugas (task-oriented) atau lebih mementingkan hubungan (relationship oriented).

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dikemukakan oleh Schmidt (Gregory Stone et al., 2004) ada 3 yaitu:

- a. Latar belakang pengetahuan dan pengalaman seorang pemimpin.
- b. Adanya keinginan, kematangan, kemandirian, kebebasan bertindak untuk mendapatkan tanggung jawab serta wewenang bagi para bawahannya.

- c. Sifat tugas dan tekanan waktu yang diberikan, serta kenyamanan dari kelompok kerja dalam situasi lingkungan. Sedangkan menurut Sahertian (2010) terdapat kaitan antara orientasi tugas dan hubungan dalam gaya kepemimpinan, yaitu:

- 1) Adanya prioritas menyelesaikan tugas dengan maksimal dengan hasil yang baik, namun terjadi hubungan kerja sama yang kurang antara pemimpin dan bawahannya.

Sebaliknya, jika memprioritaskan hubungan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dengan berdampak baik seperti semangat kerja yang meningkat dan mengabdikan terhadap pekerjaan sebagai efek dari suasana kerja yang nyaman. Namun, hal tersebut berdampak pada penyelesaian tugas dan hasil yang berkurang.

Sutrisno (2014: 213) Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan.

George R. Terry (1972: 458) Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hemhiel dan Coons (1957: 7) Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama (*shared goal*).

Dalam proses pelaksanaan tugas kepala desa diperlukan kepemimpinannya, adapun definisi kepemimpinan menurut S. Pamuji, (2004:45) antara lain :

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerja;
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara sipemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang (authority); jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut (wibawa) sedangkan manajemen menekankan kepada wewenang yang ada;
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada pada dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk memperahkan dana dan daya (funds and forces) yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif;
- d. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan sipemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapainnya tujuan organisasi, sedangkan manajemen mengarah kepada tercapainya kepada tujuan organisasi secara langsung; sifatnya selalu kolektif, sebab melayani kepentingan peroranganpun asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum.

Mempetakan definisi kepemimpinan Sulistiyani (2003:44) adalah sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok.
- b. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat.
- c. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan.
- d. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi.
- e. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan.
- f. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan.
- g. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi.
- h. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan.
- i. Kepemimpinan sebagai awal struktur.

Kepemimpinan menurut Syafiie berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

8. Konsep Gaya Kepemimpinan

Mulyasa (2009: 108) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buah, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan.

Wahyudi (2009: 123) mengemukakan bahwa perilaku kepemimpinan yang ditampilkan dalam proses manajerial secara konsisten disebut sebagai gaya (style) kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dimaksudkan sebagai cara berperilaku yang khas dari seorang pemimpin terhadap para anggota kelompok. Dengan demikian, gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin berperilaku secara konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompok.

Robbins (2016: 127) Kepemimpinan (leadership) merupakan proses memimpin sebuah kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Taryamam (2016: 7) Kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok individu untuk saling bekerja sama, tidak saling menjatuhkan dalam rangka mencapai tujuan Organisasi.

Miftah Thoha (2010: 76) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang konsisten yang kita tunjukkan dan diketahui oleh pihak lain ketika kita berusaha memengaruhi kegiatan- kegiatan orang lain. Berdasarkan

uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten diketahui oleh pihak lain ketika mempengaruhi orang lain.

Gaya kepemimpinan menurut Malayu SP. Hasibuan (2009:172), yaitu:

a. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut system sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Falsafah pemimpin ialah “bawahan adalah untuk pimpinan/atasan”. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana keputusan yang telah ditetapkan pimpinan. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar dan paling cakap. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan instruksi / perintah, ancaman hukuman serta pengawasan dilakukan secara ketat. Orientasi kepemimpinannya difokusnya hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan. Pimpinan menganut sistem manajemen tertutup (closed management), kurang menginformasikan keadaan perusahaan pada bawahannya. Pengkaderan kurang mendapat perhatiannya.

b. Kepemimpinan Partisipatif,

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan dan

partisipasi para bawahannya. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Falsafah pemimpin ialah “pimpinan (dia) adalah untuk bawahan”. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan oleh bawahannya. Pemimpin mengatur sistem manajemen terbuka (open management) dan desentralisasi wewenang. Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.

c. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan delegatif bila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam mengerjakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahannya itu. Pada prinsipnya pemimpin bersikap menyerahkan dan mengatakan kepada bawahan “Inilah pekerjaan yang harus Saudara kerjakan, saya tidak peduli, terserah Saudara bagaimana mengerjakannya asal pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan baik”. Disini pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan dalam arti pimpinan menginginkan, agar para bawahan bisa mengendalikan diri mereka sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pimpinan tidak akan membuat peraturan- peraturan tentang

pelaksanaan pekerjaan itu dan hanya melakukan sedikit kontak dengan para bawahannya. Dalam hal ini, bawahan dituntut memiliki kematangan pekerjaan (kemampuan) dan kematangan psikologis (kemauan). Kematangan pekerjaan dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Kematangan psikologis dikaitkan dengan kemauan atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan rasa yakin dan keterikatan.

Menurut Koontz, Harold dan Weihrich, Hein (1990: 347-355) ada empat teori yang dapat menjelaskan perilaku dan gaya kepemimpinan seseorang, yaitu:

- a) Kepemimpinan yang didasarkan kepada penggunaan kewenangan;
- b) Sistem kepemimpinan Likert;
- c) Kisi-kisi manajerial model Blake dan Mouton;
- d) Kepemimpinan yang didasarkan kepada perbagi gaya, yang terentang mulai dari banyak sampai sedikit penggunaan kekuasaan dan pengaruh;

Gaya Kepemimpinan yang didasarkan Kepada Penggunaan Kewenangan

Ada 3 Gaya Yaitu:

1. Gaya Otokratik

Menitik beratkan penggunaan sistem imbalan dan hukuman terhadap para pengikutnya. Selain itu, ia menggunakan cara komando tanpa pertanyaan lebih lanjut dari bawahan. Semua kegiatan kerja ditentukan oleh atasan, termasuk adanya pengawasan yang ketat.

2. Gaya Demokratif/ Partisipatif

Menekankan kepada cara konsultasi dengan bawahan tentang kegiatan mendatang, mengambil keputusan dan mendorong tumbuhnya peran serta bawahan. Semua kegiatan diputuskan berdasarkan usulan dari bawah.

3. Gaya Bebas (*free-rein*)

Menggunakan sedikit wewenangnya terhadap bawahan. Semua keputusan diserahkan kepada bawahan, sehingga atasan sangat bergantung kepada bawahan dalam hal pengambilan keputusan.

B. Penelitian Terdahulu.

Keberadaan dari penelitian terdahulu merupakan bentuk konseskuensi akdemi dalam penulisan ini. Adapun fungsi utama dari penelitian terdahulu adalah sebagai *standing position* pada penelitian ini. Dimana akan ditemukan perbedaan-perbedaan mendasar dari penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian dalam tulisan ini, sehingga akan memperkaya khasanah keilmuan dalam kajian pemerintahan kedepannya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19. adalah sebagai berikut.

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Siti Marwiyah, Nur Halima, Finni	Analisis Tipe Kepemimpinan Paternalistik Dalam Peningkatan	1. Tipe Kepemimpinan 2. Permasalahan Penelitian	1. Sama-sama meneliti tentang situasi Covid-19 di Desa. 2. Sama-sama meneliti Gaya Kepemimpinan

	Maulidi (2020).	Pelayanan Publik Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19		
2.	Rira Nuradhwati (2015).	Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Di Desa Baregbeg Dan Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis	1. Lokasi penelitian berbeda. 2. Tidak dalam situasi covid-19.	1. Sama-sama meneliti tentang kepemimpinan situasional. 2. Sama-sama menggunakan tipe penelitian kuantitatif. 3. Sama-sama meneliti kepala desa.
3.	Slamet Hariyanto, Katam (2020).	Analisis kepemimpinan situasional kepala desa dalam pembangunan desa Nglutung kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung	1. Lokasi penelitian berbeda. 2. Metode penelitian berbeda karena menggunakan kualitatif. 3. Fenomena penelitian berbeda.	1. Focus penelitian sama-sama kepemimpinan situasional. 2. Sama-sama meneliti di desa. 3. Menggunakan teori yang sama.

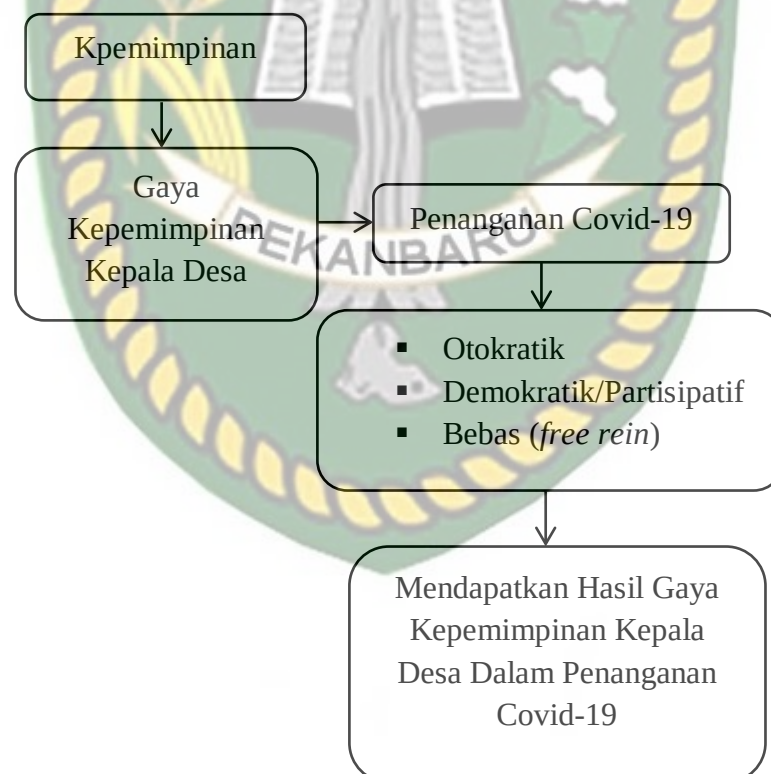
C. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori- teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variable penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwan penelitian ini

bermaksud untuk melihat Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

Oleh sebab itu, penulis menggunakan teori Koontz, Harold dan Weihrich, Heinz (1990: 343-355) yang kemudian penulis jadikan sebagai kerangka pikir mengenai penelitian tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar II. I :Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.



D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain
3. Penanganan Covid-19 bisa dimulai dari diri sendiri, dengan cara tetap mematuhi Protokol Kesehatan, contohnya hindari keramaian, memakai masker, tidak berjabat tangan serta menjaga jarak.
4. Gaya Kepemimpinan menurut Koonz, Harold dan Wheihrich, Heinz (1990: 347-355) berdasarkan Kepemimpinan Yang didasarkan Kepada Penggunaan Kewenangan.
5. Gaya Otokratik adalah gaya yang menggunakan komando dan sistem imbalan. Semua kegiatan kerja ditentukan atas keputusan pimpinan (kades).
6. Gaya Demokratik/Partisipatif adalah menekankan berkonsultasi bersama Perangkat Desa Unsur Masyarakat.
7. Gaya Bebas (*free rein*) adalah Gaya yang sedikit menggunakan kewenangannya terhadap terhadap Penangan Covid-19. Kepala Desa bergantung kepada perangkat Desa dalam pengambilan keputusan terkait Covid-19

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Gaya Kepemimpinan yang didasarkan kepada penggunaan wewenang. Koontz, Harold dan Weihrich, Heinz (1990: 347-355)	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19	Gaya Otokratik	- Menggunakan komando - Semua kegiatan ditentukan oleh pimpinan
		Gaya Demokratik /Partisipatif	- Berkonsultasi Bersama perangkat desa dan unsur masyarakat - Semua kegiatan diputuskan atas usulan perangkat desa dan unsur masyarakat
		Gaya Bebas (<i>Free Rein</i>)	- Bergantung kepada perangkat desa dalam mengambil keputusan terkait Covid-19 - Sedikit menggunakan kewenangannya terhadap penanganan covid-19

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendapat Creswell “penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan yang Harrison berpendapat bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai paradigma. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang- orang (subjek) itu sendiri.

Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati.

Maka dari itu penulis akan menggunakan kondisi obyektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data- data yang berkaitan dengan masalah masalah Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Desa Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena di Desa Koto Rajo merupakan Desa yang terkena dampak Covid-19 serta merupakan desa yang jumlah kasus positif Covid-19 nya terbanyak di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan penelti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu

1. Informan Kunci (*key informant*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa Koto Rajo.
2. Informan Utama (*main informant*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, yaitu: Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Koto Rajo.

D. Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik jenis wawancara. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi yang sedikit, yakni seperti Kepala Desa Koto Rajo, Anggota BPD serta Masyarakat Desa Koto Rajo dan dengan teknik Wawancara peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk melihat dan menjumpai setiap responden yang ada untuk langsung dimintai keterangan.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan kerangka penelitian, berupa data tentang identitas responden, data hasil kuisioner, wawancara dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia di Desa Koto Rajo, yang mencakup data mengenai kondisi covid-19 di desa, keadaan geografis daerah penelitian, keadaan demografis termasuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta data mengenai sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh keterangan Kepala Desa Koto Rajo mengenai situasi dan Tindakan yang ambil dalam penanganan Covid-19.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari Kepala Desa Koto Rajo yang melaksanakan Gaya Kepemimpinannya dalam penanganan covid-19..

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk melihat dan mengamati secara langsung kelapangan bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo dalam penanganan covid-19.

c. Dokumentasi

Menyediakan dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber- sumber informasi dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Nazir (1999 ; 419) bahwa “analisis data merupakan, mengelompokkan membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca”. Analisa merupakan tahap yang penting, karena data yang terkumpul masih harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui makna yang berguna dalam pemecahan masalah pada penelitian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III. 1: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020/2021 Bulan/Minggu															
		Juni				Juli				September				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi Kabupaten definitif yang memiliki 15 kecamatan. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara 0°00 - 1°00 lintang selatan dan 101°02 - 101°55 bujur timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing
- Sebelah Selatan: Provinsi Jambi
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera barat
- Sebelah Timur: Kabupaten Indragiri Hulu

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi $\pm 7.656,03 \text{ Km}^2$ dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Jarak lurus ibukota kecamatan yang terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota kecamatan Kuantan Tengah. Sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota kecamatan Cerenti. Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C –

36,5°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C - 22°C . Curah hujan pada 2014 berkisar antara 108,25- 329,85 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Kuantan Hilir Seberang merupakan pemekaran wilayah dari Kecamatan Kuantan Hilir pada Tahun 2012. Letak Geografisnya sangat strategis yaitu merupakan Kecamatan yang dilalui oleh jalan lintas timur. Dan juga merupakan salah satu Kecamatan yang terletak paling dekat dengan Ibukota Kabupaten. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang terletak ± 114 Km dari pusat Ibukota Provinsi Riau dan juga Kecamatan ini memiliki jarak yang dekat ke Ibukota Kabupaten yaitu sekitar ± 45 Km yang dapat di tempuh dalam waktu ±45 menit.

Keadaan dan batas daerah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang adalah memiliki luas wilayah menurut data dari Kantor Camat yaitu ± 847,37 km² dengan kepadatan penduduk ± 1250,72 jiwa/km². Dan secara administratif Kecamatan Kuantan Hilir Seberang terdiri dari 14 Desa dengan pusat pemerintahan di Desa Teratak Jering. Berikut daftar nama Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, yaitu : Desa Koto Rajo, Kasang Limau Sundai, Danau, Pengalihan, Teratak Jering, Tnjung Pisang, Lumbok, Pelukahan, Pulau Baru, Tnjung, Rawang Oguang, Soriek, Pulau Kulur, Pulau Beralo.

Kemudian dilihat dari bentangan wilayahnya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang merupakan dataran rendah, rawa-rawa, bukit-bukit serta lembah-lembah yang memiliki karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan beberapa Kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Petalangan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunut dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langgam.

C. Gambaran Umum Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Desa Koto Rajo merupakan salah satu desa yang wilayahnya sangat dekat dengan Ibukota Kecamatan yaitu Kelurahan Sorek Satu yang langsung dilalui oleh Jalan Lintas Timur, dan juga Desa Koto Rajo ini begitu dekat dengan Ibukota Kabupaten. Maka oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Desa Koto Rajo menjadi lokasi urbanisasi bagi penduduk di luar Desa Koto Rajo, bahkan penduduk desa selain memiliki suku Melayu juga kebanyakan memiliki suku Jawa, Minang dan Batak yang menetap di Desa ini. Jadi tidak menutup kemungkinan penduduk Desa Koto Rajo sangat pesat akan perkembangan dan perubahan penambahan penduduknya, baik dari penduduk pendatang maupun penambahan penduduk dari angka kelahiran, dan kemungkinan beberapa tahun kedepan jumlah penduduk akan terus bertambah.

D. Kondisi Pemerintahan Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing

Dari segi pemerintahan, melihat secara geografis serta letaknya Desa Koto Rajo ini yang memiliki luas wilayah $\pm 115,00 \text{ Ha}^2$, dan memiliki jumlah penduduk ± 2.180 jiwa/orang, maka Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing ini terdiri dari beberapa wilayah, yaitu terbagi menjadi 3 Dusun dengan 11 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW).

Dalam menjalankan pemerintahan, maka Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Desa Koto Rajo ini adalah sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya Masyarakat yang aman, tenteram, dan damai melalui peningkatan perekonomian, keimanan, akhlak, ketakwaan serta berbudaya melayu”

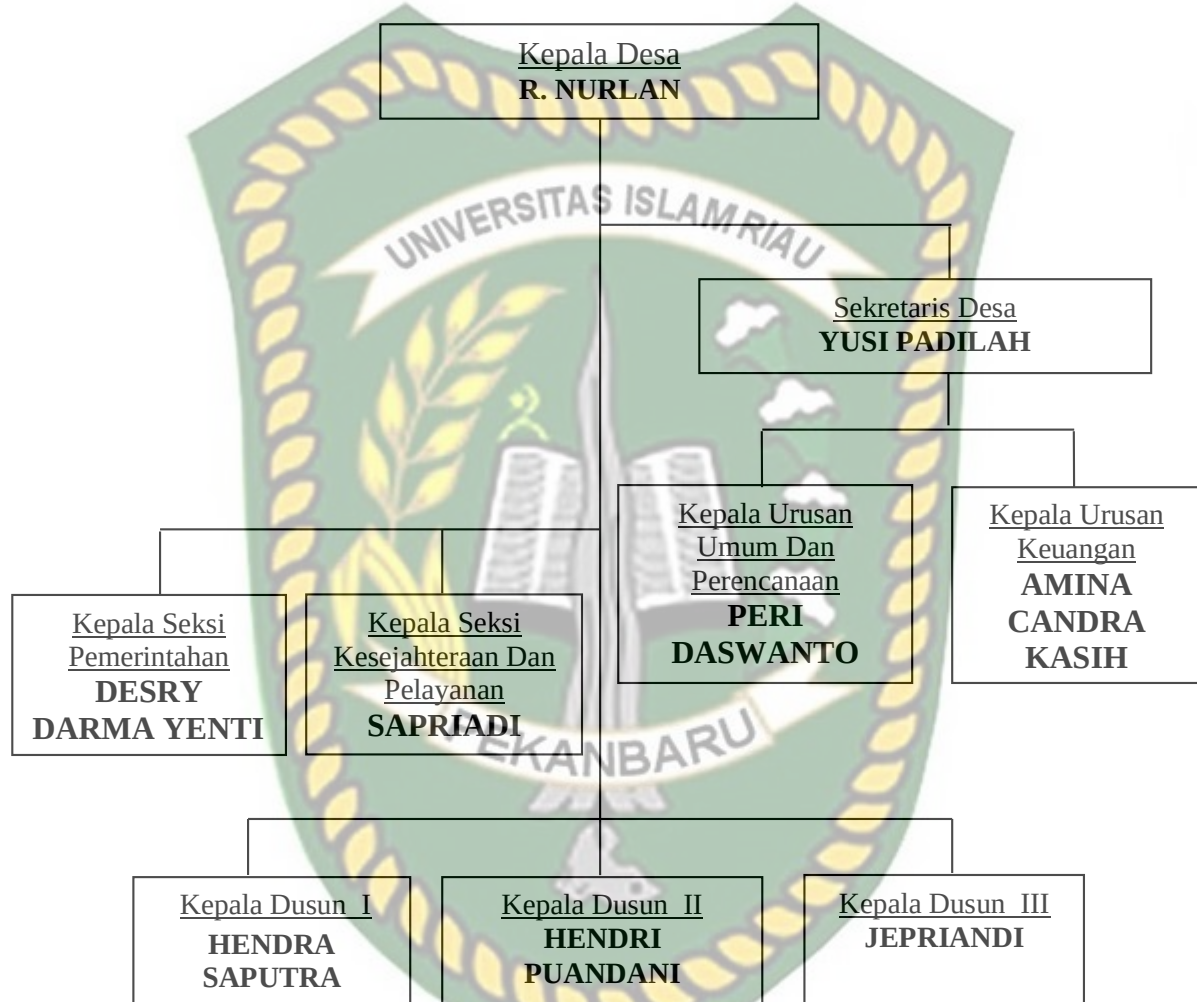
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Koto Rajo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Koto Rajo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

MISI

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk dapat melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Koto Rajo yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan lebih maju kedepannya. Berdasarkan peraturan yang harusnya diterapkan setiap pemerintahan Desa, dan sesuai data yang di peroleh dari kantor Desa Koto Rajo, maka dapat di jelaskan bahwa aparat desa terdiri dari, sebagai berikut : Seorang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Permasyarakatan Desa (BPD), Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Masyarakat Desa Koto Rajo.

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 - 2024



Staf Kantor Desa :

1. Bendahara : NELA TRIANA
2. Kebersihan : NURLELA
3. Pengantar Surat : PENDI

E. Demografi Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuansing

1. Batas Wilayah Desa Koto Rajo

Desa Koto Rajo memiliki morfologi wilayah yang merupakan terdiri atas dataran rendah, gambut, rawa-rawa, bukit-bukit serta lembah-lembah yang memiliki karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik dan air tanahnya payau. Sehingga masyarakat banyak memanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk bercocok tanam, lahan perkebunan sawit, dan lahan perkebunan karet.

Dan secara geografis serta letaknya Desa Koto Rajo ini memiliki luas wilayah $\pm 115,00 \text{ Ha}^2$, dan desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa lainnya yaitu terletak diantara :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangean,
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cirenti,
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Lembu, dan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benai.

2. Luas Wilayah Desa Koto Rajo

Desa Koto Rajo selain memiliki wilayah yang sangat strategis serta dilalui langsung oleh Jalan Lintas Timur, maka desa ini juga memiliki luas wilayah yang bervariasi karena terlihat dari beberapa kawasan wilayah berikut ini;

Tabel IV.1: Kawasan Luas Wilayah Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kawasan Wilayah	Luas Wilayah (Ha)
1	Pemukiman	122
2	Pertanian Sawah	163
3	Ladang / Tegalan	161
4	Hutan	3
5	Rawa - Rawa	0
6	Perkantoran	0,25
7	Sekolah	0,75
8	Jalan	80
9	Lapangan Sepak Bola	1,5
Jumlah		531,5 Ha

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

3. Orbitasi Desa Koto Rajo

Desa Koto Rajo ini merupakan salah satu desa yang wilayahnya sangat dekat dengan Ibukota Kecamatan yaitu Desa Pangean yang langsung dilalui oleh Jalan Lintas Timur, dan juga Desa Koto Rajo ini begitu dekat dengan Ibukota Kabupaten Kuansing, maka dapat dirincikan jarak yaitu :

- a) Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat : 2 Km
- b) Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan : 10 Menit
- c) Jarak ke Ibukota Kabupetan : 45 Km
- d) Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten : 45 Menit

4. Jumlah Penduduk Desa Koto Rajo

Desa Koto Rajo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing yang memiliki penduduk yang bervariasi, mulai dari suku Melayu dan terdapat juga beberapa suku lainnya seperti Suku Jawa, Minang dan Batak. Jadi berdasarkan data- data yang disampaikan oleh Ketua RT kepada pemerintahan Desa Koto Rajo jumlah penduduk Desa Koto Rajo semuanya $\pm$ 2.180 jiwa/orang dengan 624 Kepala Keluarga (KK), maka di dapatlah data dari kantor Desa yang berhubungan dengan jumlah penduduk, yaitu :

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa/orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	1.211	55
2	Perempuan	969	44
Jumlah		2.180	100 %

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

F. Keadaan Sosial Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

1) Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan di Desa Koto Rajo pada dasarnya dari tahun ke tahun sangat meningkat. Ini di karenakan kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya. Jadi, di samping itu semua dapat di data jumlah penduduk di Desa Koto Rajo yang dalam tingkat pendidikan, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.3: Jumlah Penduduk Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase (%)
1	SD / MI	763	35
2	SLTP / MTs	218	10
3	SLTA / MA	872	40
4	S1 / Diploma	130	6
5	Putus Sekolah	152	7
6	Buta Huruf	45	2
Jumlah		2.180 Orang	100 %

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

2) Sektor Lembaga Pendidikan

Dari sekian banyaknya jumlah penduduk Desa Koto Rajo, maka banyak juga anak-anak yang membutuhkan tempat belajar dan pendidikan yang layak seperti masyarakat di perkotaan. Namun, melihat situasi dan kondisi di Desa Koto Rajo saat ini, maka banyak yang sekolah dan melanjutkan pendidikan di luar Desa Koto Rajo. Ini di lihat dari kurangnya lembaga pendidikan yang terdapat di Desa, hanya tersedia sebagai berikut :

Tabel IV.4: Daftar Lembaga Pendidikan Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Persentase (%)
1	Gedung TK / PAUD	1	33
2	SD / MI	1	33
3	SLTP / MTs	1	33
4	SLTA / MA	-	-
5	S1 / Diploma	-	-
6	Lain- lain	-	-
Jumlah		3 Buah	100 %

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

3) Sektor Kesehatan

Perhatian di bidang kesehatan di Desa Koto Rajo pada saat ini masih belum memuaskan masyarakat desa dalam sistem pelayanannya, terutama di lihat dari kurangnya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti Posyandu atau Klinik Kesehatan di desa ini, karena hanya terdapat hanya satu posyandu saja yaitu hanya terdapat di RT 006, RW 003 Dusun II Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuansing.

4) Sektor Keagamaan

Berdasarkan banyaknya penduduk yang bervariasi di Desa Koto Rajo, maka dapat di Data tentang jumlah pemeluk Agama Desa ini yang terdapat di Tahun 2016, yaitu :

Tabel IV.5: Jumlah penduduk Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase (%)
1	Islam	2180	100
2	Khatolik	-	-
3	Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		2.180	100 %

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

Dan sesuai dengan daftar pemeluk agama di Desa Koto Rajo ini, maka dapat di lihat juga beberapa data tempat ibadah yang terdapat di Desa Koto Rajo ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.6: Daftar Jumlah Tempat Ibadah Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tempat Ibadah	Jumlah Bangunan
1	Masjid / Musholla	5
2	Gereja	-
3	Pura	-
4	Vihara	-
Jumlah		5

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

G. Keadaan Ekonomi Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

Selain Perhatian di bidang kesehatan dan sosial, maka pemerintah di Desa Koto Rajo pada saat ini juga memperhatikan keadaan ekonomi masyarakatnya. Dan dapat di lihat bahwa perekonomian masyarakat desa sangat bervariasi dan bermacam- macam sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Jadi, sesuai data yang di dapat dari Kantor Desa Koto Rajo dapat di jabarkan tentang Keadaan Ekonomi tersebut, yaitu adalah sebagai berikut :

1) Sektor Pertanian

Tabel IV.7: Sektor Pertanian Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Jenis Tanaman	Luas Wilayah (Ha)
1	Padi Sawah	0
2	Padi Ladang	0
3	Jagung	0
4	Palawija	0
5	Tembakau	0
6	Tebu	0
7	Kakao / Coklat	0
8	Sawit	502
9	Kelapa	0
10	Karet	518
11	Singkong	1
12	Lain- Lain	1
Jumlah		1.022 Ha

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

2) Sektor Peternakan

Tabel IV.8: Sektor Peternakan Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)
1	Kambing	50
2	Sapi	15
3	Kerbau	0
4	Ayam	500
5	Itik	200
6	Burung	150
7	Lain- Lain	0
Jumlah		915 ekor

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

3) Sektor Ketenagakerjaan dan Mata Pencanharian

Tabel IV.9: Sektor Ketenagakerjaan dan Mata Pencanharian Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase (%)
1	Petani	854	39
2	Pedagang	167	8
3	PNS	36	7
4	Tukan	50	2
5	Guru	20	1
6	Bidan / Perawat	2	0,09
7	TNI / Polri	1	0,04
8	Pensiunan	7	0,32
9	Sopir / Angkutan	24	1,10
10	Buruh	129	6
11	Jasa Persewaan	1	0,04
12	Swasta	32	1,46
13	Tidak Bekerja	857	39
Jumlah		2.180	100 %

Sumber : Kantor Desa Koto Rajo

Jadi, salah satu yang menjadi indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari lajunya pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Secara langsung akan menggerakkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja, atau karena pengaruh faktor lain seperti kebijakan pemerintah. Dan apabila kebijakan itu telah dikeluarkan seperti memberikan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Desa Koto Rajo, maka itu semua dapat mengurangi angka pengangguran, dan sedikit demi sedikit juga akan berdampak mengurangi kesenjangan sosial serta mengurangi penyakit masyarakat.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data- data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan yaitu Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Umur, Agama, serta Jabatan/Pekerjaan. Selain itu diperoleh juga data tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V dibawah ini :

A. Identitas Responden

Dalam menentukan responden dalam penelitian ini menggunakan Informan Kunci (*key informan*) dan Informan Utama (*main informan*), Berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah informan penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 orang Ketua BPD, 1 orang Bendahara Umum Desa.

B. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan - tanggapan responden terhadap indikator - indikator penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

Kepemimpinan seorang kepala desa sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya saat ini, karena selaku pemimpin kepala desa harus memimpin masyarakatnya dalam mengatasi atau berperilaku dalam menghadapi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Sebagai Kepala Desa ia harus memastikan agar masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Hukum Tua adalah sebutan nama lain Kepala Desa di Kabupaten Minahasa yang merupakan Kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang berkewajiban melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. (Waworundeng, W. 2017) Masa pandemi saat ini kepemimpinan sangatlah penting dalam menghadapi suatu masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini.

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 perlu mengikutsertakan BPD, Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat Itu Sendiri sebagai pelaksana dalam Mencegah Penyebaran Covid-19. Desa merupakan salah satu garda terdepan dalam mengontrol penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah mendorong keterlibatan

desa dalam penanganan penyebaran virus corona melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Meskipun saat ini sudah terjadi penurunan kasus Covid-19 dan sejumlah wilayah sudah mendapat kelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun pemerintah desa diminta jangan lengah. Peranan desa perlu digalakkan dan diberdayakan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus yang muncul. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan menginstruksikan menggunakan dana desa untuk mengedukasi masyarakat di desa dalam hal penanganan kasus Covid-19

Pada dasarnya Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 dapat diketahui beberapa indikator. Adapun indikator yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Indikator Gaya Kepemimpinan menurut Koontz, Harold dan Weihch, Heinz (1990: 347-355)

1. Gaya Otokratik
2. Gaya Demokratik/Partisipatif
3. Gaya Bebas (Free Rein)

Dan dibawah ini peneliti akan menguraikan satu per satu hasil penelitian dengan judul Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19, berdasarkan indicator yang digunakan serta metode wawancara penelitian dengan responden yang telah ditetapkan sebelumnya, hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Gaya Otokratik

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 akan dinilai dalam indikator Gaya kepemimpinan otokratik dimana indikator ini memiliki dua sub indikator yaitu Menggunakan komando dan Semua kegiatan ditentukan oleh pimpinan, ke dua sub indikator tersebut akan menjadi nilai ukuran yang dilihat dari hasil wawancara di bawah ini:

Berdasarkan dari hasil wawancara langsung dengan Ketua BPD (Pingki Prayogo) di kediamannya diketahui bahwa kepada desa memimpin dengan cara komando dalam penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Ketua BPD sebagai berikut:

*“Dalam pengambilan keputusan mengenai Penanganan Covid-19 Kepala Desa memutuskan sendiri keputusan terkait Penanganan Covid-19”.
(Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Koto Rajo, 4 Novemver 2021).*

*“Dalam pengambilan keputusan Kepala Desa tidak melibatkan unsur masyarakat untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan mengenai Penanganan Covid-19, melainkan memutuskan sendiri untuk keputusan mengenai Penanganan Covid-19 di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang”.
(Hasil wanwancara dengan masyarakat Koto Rajo, 4 Novemver 2021).*

Rapat yang demokratis menjadi suatu pilihan yang ideal bagi seorang pemimpin. Karena menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang- wenang. Seorang pemimpin yang ideal harus senantiasa memberikan arahan kepada Perangkat Desa untuk selalu

berinisiatif sendiri, berkreasi, berpendapat dan memberikan dorongan. Seperti halnya seorang kepala desa, yang seharusnya memberikan peluang kepada perangkat desa dan masyarakat untuk berpendapat dan menampung aspirasinya dengan tetap memperhatikannya, karena semua itu diyakini demi kepentingan dan kemajuan desanya.

“Gaya kepemimpinan memberikan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara semua kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata-mata. Dan hal tersebut terjadi di Desa Koto Rajo, dimana Kepala Desa memutuskan sendiri segala kebijakan terkait Penanganan Covid-19”. (Hasil wawancara dengan RW Dusun II Desa Koto Rajo pada tanggal 2 November 2021).

“Kepala Desa tidak berkonsultasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan Penanganan Covid-19, melainkan menggunakan komando dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilakukukan untuk Penanganan Covid-19 tersebut”. (Hasil wawancara dengan Aminah Candra Kasih selaku Bendahara Desa Koto Rajo pada tanggal 3 November 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa menggunakan cara komando di setiap pengambilan keputusan terkait dalam penanganan Covid-19, hal ini dapat dilihat karena Kepala Desa dalam pengambilan keputusan semua kegiatan mengenai penanganan Covid-19 diputuskan atas sepihak atau semua kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 ditentukan oleh Pimpinan. Dengan ditandai sangat banyaknya petunjuk

yang datangnyanya dari Pemimpin dan sangat terbatasnya bahkan sama sekali tidak ada peranan Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dalam Penanganan Covid-19. Akibat dari pengambilan keputusan sepihak masyarakat juga sudah mulai absen dari kegiatan atau agenda sosialisasi terkait Penangan Covid-19, masyarakat juga mulai tidak patuh terhadap himbauan yang disampaikan mengenai protokol kesehatan atas Penanganan Covid-19.

Gaya kepemimpinan Otokratik ini hampir sama dengan Kepemimpinan Otoriter. Kesamaan antara kedua gaya kepemimpinan ini merupakan satu- satunya sosok pemimpin dalam suatu organisasi yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan yang strategis. Disisi lain pola perilaku dan strategi seperti ini disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi serta memberikan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu Kepemimpinan Otokratik ini berada pada kategori *sedang* atau *cukup baik*.

2. Gaya Demokratik/Partisipatif

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 akan dinilai dalam indikator Gaya Demokratik/Partisipatif dimana indikator ini memiliki dua sub indikator yaitu Berkonsultasi Bersama Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat dan Semua kegiatan diputuskan atas usulan perangkat desa dan unsur masyarakat, ke dua sub indikator tersebut akan menjadi nilai ukuran yang dilihat dari hasil wawancara di bawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Tokoh Adat Kegenegerian Koto Rajo tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

“Dalam pengambilan keputusan mengenai Penanganan Covid-19, Kepala Desa Koto Rajo selalu mengadakan rapat atau musyawarah untuk membahas perkara yang perlu diperbaiki atau dievaluasi guna untuk kemajuan Desa Koto Rajo itu sendiri, dari hasil rapat tersebut banyak bermunculan ide- ide sehingga kepala desa dapat memiliki gambaran bagaimana dalam pengambilan keputusan kedepannya terkait Penanganan Covid-19 di Desa Koto Rajo. (Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Kenegerian Koto Rajo, 4 November 2021).”

Pemerintah Desa adalah suatu organisasi dimana didalamnya terdapat bagian- bagian yang saling berhubungan dan membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Pemerintahan Desa harus ada hubungan baik antara masyarakat dan Pemerintahan Desa. Begitu pula dengan Kepala Desa Koto Rajo dalam penanganan covid-19, Kepala Desa harus menjalin hubungan yang baik sebagai Seorang Pemimpin, Kepala Desa harus menciptakan suasana yang kondusif dalam kepemimpinannya. Hal tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara masyarakat ataupun dengan Perangkat Desa dan pihak- pihak lain yang terkait. Kepala Desa melakukan komunikasi yang baik dengan cara menghormati yang lebih tua dalam organisasi yang dipimpinnya dan dengan melakukan evaluasi secara rutin dalam kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Tokoh Masyarakat tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19.

“Menurut saya musyawarah yang baik itu yang banyak melibatkan orang, agar tidak monoton, artinya didalam proses berlangsungnya rapat harus ada pendapat atau masukan yang datang dari peserta rapat atau musyawarah. Supaya ide- ide yang diusulkan dapat dijadikan gambaran untuk menangani pengambilan keputusan mengenai Penanganan Covid-19, Kemudian yang terjadi di Desa Koto Rajo ini apabila rapat atau musyawarah Kepala Desa selalu meminta masyarakat untuk ikut bicara menyalurkan aspirasi, ide- ide atau gagasan yang mereka punya, jadinya ketika banyak orang yang memberikan ide- ide otomatis semakin banyak yang dipelajari dan dipahami sehingga dapat memberikan manfaat. Dan apa yang menjadi persoalannya dapat terselesaikan dengan cara yang baik. Seperti itulah kepemimpinan Kepala Desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Koto Rajo. (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Koto Rajo, 3 November 2021).

Dari hasil wawancara penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan ini cukup baik dan efektif dalam sebuah Desa yang dipimpin oleh Seorang Kepala Desa. Terlihat dari hasil wawancara yang penulis peroleh, respon masyarakat cukup baik ketika diajak bermusyawarah atau melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan mengenai Penangan Covid-19. Karena Gaya ini cukup banyak melibatkan Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat. Dengan demikian Gaya ini cukup Baik dilakukan dalam

pengambilan keputusan mengenai Penanganan Covid-19. Dan harapan untuk seterusnya harus kembali melibatkan Perangkat Desa, Masyarakat serta Tokoh Adat yang ada di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Ada baiknya jika diteruskan dengan Gaya seperti ini bisa menjadikan Desa Koto Rajo lebih maju dan berkembang dalam hal apapun. Karena Masyarakatnya dalam Musyawarah atau Rapat banyak memberikan masukan atau ide- ide yang cemerlang untuk keberhasilan Desa Koto Rajo itu sendiri. Hal tersebut dilaksanakn oleh Kepala Desa Koto Rajo akan tetapi tidak konsisten sehingga pada indikator Gaya Demokratik/Partisipatif berada pada kategori *cukup baik*.

3. Gaya Bebas (Free Rein)

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 akan dinilai dalam indikator Gaya Bebas (*Free Rein*) dimana indikator ini memiliki dua sub indikator yaitu Bergantung kepada Perangkat Desa dalam mengambil keputusan terkait Covid-19 dan Sedikit menggunakan kewenangannya terhadap Penanganan Covid-19, kedua sub indikator tersebut akan menjadi nilai ukuran yang dilihat dari hasil wawancara di bawah ini :

Hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Koto Rajo tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19:

“Dalam setiap pengambilan keputusan mengenai Penanganan Covid-19, saya selaku Kepala Desa selalu mengadakan rapat ataupun Musyawarah bersama Perangkat Desa maupun Unsur Masyarakat yang ada di Desa Koto

Rajo, bahkan saya membebaskan kepada peserta yang terlibat dalam Musyawarah untuk memberikan atau menyampaikan ide- ide yang mau disampaikan. Guna untuk kedepannya tidak ada yang bicara diluar forum Musyawarah. Untuk itu saya selalu melibatkan banyak orang agar pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Desa Koto Rajo terlaksana dengan baik dan maksimal”.
(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Rajo, 9 November 2021).

Rapat atau musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Desa berjalan dengan lancar, meskipun terkadang masih terdapat perbedaan pendapat antara peserta Musyawarah. Justru semakin banyak ide atau pendapat yang masuk semakin banyak pula gambaran Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam Penanganan Covid-19. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan didalam proses berlangsungnya rapat, bahkan membawa dampak positif bagi peserta rapat terutama Kepala Desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pendapat maka semakin baik partisipasi masyarakatnya dan semakin banyak pula ide- ide yang harus dipecahkan dalam penanganan covid-19.

Hasil wawancara langsung dengan Ketua BPD Desa Koto Rajo tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19:

“Sejauh ini Kepala Desa Koto Rajo memiliki cara atau tipe komunikasi yang cukup baik dengan BPD ataupun Perangkat Desa lainnya dalam menangani Penanganan Covid-19. Keputusan mengenai Penanganan Covid-19 Kepala Desa memberikan hak kepada Perangkat Desa untuk mengambil keputusannya.

Komunikasi merupakan modal utama dalam memimpin suatu masyarakat. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD desa Desa Koto Rajo, 4 November 2021).

Kepala Desa Koto Rajo memutuskan bersama- sama dengan BPD terkait Penanganan melalui musyawarah desa dan musyawarah di tiap RW. Kepala Desa Koto Rajo juga mengajak warganya untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah Desa dengan cara menyebarkan informasi terkait undangan musyawarah Desa kepada masyarakat Desa Koto Rajo. Kepala Desa juga senantiasa melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan melalui forum-forum musyawarah.

Hasil wawancara langsung dengan Masyarakat Desa Koto Rajo tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19:

“Dalam pengambilan keputusan mengenai Penanganan Covid-19 Kepala Desa membebaskan kepada Perangkat Desa ataupun Masyarakat untuk berpendapat atau memberikan saran, guna untuk memberikan gambaran atas putusan mengenai Penanganan Covid-19”. (Hasil wawancara dengan Masyarakat desa Desa Koto Rajo, 10 November 2021).

Dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh kepala desa koto rajo tersebut merupakan kegiatan yang langka dan jarang dilakukan oleh desadesa lainnya. Kegiatan positif ini mendapat respon yang positif pula dari masyarakat karena dengan kegiatan ini dapat membuat kepala desa lebih dekat dengan masyarakat. Dalam Penanganan Covid-19 juga Kepala Desa aktif melibatkan tokoh

masyarakat, masyarakat maupun unsur lainnya yang intinya tidak mengabaikan pihak lain dalam pengambilan keputusan.

Hasil wawancara langsung dengan RW Dusun II Desa Koto Rajo tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19:

“Kepala Desa dalam memutuskan suatu keputusan mengenai Penanganan Covid-19 selalu meminta gambaran dan pendapat kepada Perangkat Desa ataupun Masyarakat. Walau gimanapun Kepala Desa meminta ide atau pendapat kepada Masyarakat tetap Kepala Desa menggunakan sedikit kewenangannya terhadap Penanganan Covid-19”. (Hasil wawancara dengan RW Dusun II desa Desa Koto Rajo, 2 November 2021).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo memberikan pengaruh kepada masyarakat, maksudnya Kepala Desa memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa maupun Masyarakat untuk memberikan pendapat atau ide- ide terkait Penanganan Covid-19. Bisa dikatakan Kepala Desa bergantung kepada Perangkat Desa dalam mengambil keputusan. Namun tetap Kepala Desa menggunakan sedikit kewenangannya terhadap Penanganan Covid-19. Supaya keputusan yang diambil benar- benar efektif dan memberikan perubahan yang baik dalam Penanganan Covid-19. Sehingga pada indikator ini bisa dikatakan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo dalam Penanganan Covid-19 *cukup baik*.

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepala Desa Koto Rajo bisa dikatakan Free Rein atau memiliki Gaya

Kepemimpinan Bebas, hal ini tergambar jelas dari sikap kepala desa yang selalu bergantung kepada Perangkat Desa terkait dalam Penanganan Covid-19, akan tetapi Kepala Desa tetap menggunakan sedikit kewenangannya terkait Penanganan Covid-19. Hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara sebelumnya yang memperlihatkan sikap kepala desa yang selalu melibatkan unsur Pemerintahan Desa serta masyarakat didalam pengambilan keputusan terkait penanganan covid-19 di desa koto rajo.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo dalam Penanganan Covid-19 Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dapat dikategorikan kedalam Gaya Kepemimpinan Demokratik/ Partisipatif, dan itu sudah cukup terlaksana. Hal itu terlihat dari Kepala Desa selalu melibatkan Masyarakat, Tokoh Adat, Anggota BPD serta Perangkat Desa Koto Rajo dalam mengambil keputusan mengenai Penanganan Covid-19. Kepala Desa selalu berkonsultasi kepada Perangkat Desa serta Unsur Masyarakat dalam hal yang terkait mengenai Penanganan Covid-19.

B. Saran

Agar Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Penanganan Covid-19 dapat dimaksimalkan dimasa yang akan datang, maka Kepala Desa sebaiknya:

1. Harus adanya komunikasi yang terjalin antar Perangkat Desa, Anggota BPD, Unsur Masyarakat, Tokoh Adat serta Masyarakat dan RT/RW disetiap Dusunnya, agar semua kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan maksimal.
2. Harus mempertahankan keikut sertaan Masyarakat Tokoh Adat, RT/RW, BPD dalam Penanganan Covid-19

3. Harus bisa melakukan Sosialisasi Penanganan Covid-19 yang berkesinambungan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di Desa Koto Rajo.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Budiadrjo, Miriram. 2008. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Dasar dan Kunci Keberhasilan*: Jakarta.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat. 1998. *Perencanaan dan pengembangan karier pegawai*. Bandung: Ramaja Rosdkarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rauf, Rayunir dan Maulidiah, Sri. 2015. *Pemerintahan desa*. Zanaf Publishing: Yogyakarta.
- Poelje, GA. Van. 1977 (B. Mang Reng Say penj). *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (Algemene inleiding tot de Bestuurskunde)* Jakarta: YKD IIP.
- Prajudi, 1980. *Administrasi dan Manajemen Umum Jilid II*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riawan, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. BandungCitra: Aditya Bakti. Bandung.

- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sondang P Siagian. 2005. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhartono, 2000. *Parlemen Desa*. Yogyakarta: Laperta Pustaka Utama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudirwo, D. 1985. *Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah dan Desa*. Bandung: Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hasse Nogi, S. 2003. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Lukman Offset.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan, Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Jurnal :

Hariyanto, Slamet, Katam. 2020. Analisis kepemimpinan situasional kepala desa dalam pembangunan desa Nglutung kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung.

Marwiyah, Siti. Halima, Nur. Maulidi, Finni. 2020. Analisis Tipe Kepemimpinan Paternalistik Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19.

Nuradhawati, Rira. 2015. Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Di Desa Baregbeg Dan Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Podungge, Robiyati. S.Pd.,M.AP. 2014. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan Di Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bulango.

Peraturan :

Undang- Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran bantuan sosial secara non tunai.